KESESUAIAN PERKARA PENCURIAN DALAM PUTUSAN Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby DENGAN PENDEKATAN PROSES RESTORATIVE JUSTICE

Adinda Hilda Rachmania

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
adinda.19003@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Nomor 2605/Pid.B/2020/PNSby ini mencantumkan dakwaan pasal 362 KUHP berupa pencurian sepasang sepatu dengan sanksi 8 bulan penjara, selanjutnya terkait permasalahan kedua bahwa perbuatan pelaku ini dapat diproses dengan Restorative Justice. Penelitian pada putusan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dengan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta untuk mengetahui putusan ini dapat diproses dengan Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni Dakwaan pada putusan Nomor: 2605/Pid.B/ 2020/PN Sby tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa bahwa dakwaan pada putusan ini dikenakan pasal 362 KUHP sementara perbuatan terdakwa sesuai pada pasal 364 KUHP. Pada perkara pencurian dalam Putusan Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby Dapat diproses dengan pendekatan restorative justice tanpa adanya sanksi Penjara selama 6 bulan pada Pelaku. dengan argumentasi Pertama, berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 mulai dari tahapan Di tingkat Penyidikan (Kepolisian), lalu di tingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan tingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, bahwa dapat diproses dengan Restorative Justice mengenai proses terkait semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk diselesaikan secara bersama-sama.

Kata Kunci : Pencurian, Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice

Abstract

An Decision Number 2605/Pid.B/2020/PNSby includes an indictment of Article 362 of the Criminal Code in the form of theft of a pair of shoes with a further 8 months in prison related to the second problem that the perpetrator's actions can be processed by Restorative Justice. Research on this decision aims to determine the suitability of the charges given to the defendant with the actions committed by the defendant and to find out if this decision can be processed by Restorative Justice. This study uses the Normative Juridical Research Method. The results of this study are that the indictment in decision Number: 2605/Pid.B/2020/PN Sby is not in accordance with the actions of the defendant that the indictment in this decision is subject to Article 362 of the Criminal Code while the actions of the defendant are in accordance with Article 364 of the Criminal Code. In the case of theft in Decision Number: 2605/Pid.B/2020/PN Sby It can be processed with a restorative justice approach without any 6 months imprisonment for the perpetrator. with the first argument, based on the Chief of Police Circular Letter Number SE/8/VII/2018 starting from the stage at the Investigation (Police) level, then at the Prosecution level (Prosecutor's Office) through Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 and the Judiciary level (Supreme Court) through a Director's Decree General of the General Court of the Supreme Court Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, that it can be processed with the Restorative Justice regarding the process related to all parties with an interest in certain violations meeting to be resolved jointly.

Keywords : Theft, Misdemeanor Crime, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang terjadi di muka bumi yang mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Saat ini telah berkembang paradigma baru terkait penyelesaian Tindak Pidana yaitu sebuah konsep pemidanaan yang dinamakan dengan Restorative Justice. Bahwasannya pada putusan hakim yang penulis angkat pada penelitian ini ada beberapa unsur agar dapat diberikannya Restorative Justice, karena hal ini dapat mencegah kepadatan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Pada permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

Restorative justice juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik. Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara. Selanjutnya pada penelitian ini Penulis akan menganalisis terkait Kesesuaian Dakwaan pada Putusan 2605/Pid.B/2020/Pn Sby.

Pada Putusan yang penulis angkat ini mengenai perbuatan pidana Pencurian yang merupakan sebuah kejahatan yang sangat umum terjadi diantara sekian banyak tindak pidana yang sering ditemukan di masyarakat, Tindak Pidana Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum.

Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Di pasal itu terdapat kata "barang siapa" sehingga bisa diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan pada

perundang undangan. (I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti 2013)

Sesuai dengan perkembangan jaman unsur tersebut sudah beberapa kali mengalami banyak penafsiran. Pada awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti Perbuatan Mengambil barang tersebut berada dibawah kekuasaan nya yang nyata sehingga barang itu berada dalam kekuasaan nya. (Adami Chazawi 2003)

Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat, Ketika unsur diatas terpenuhi jelas merupakan sebuah pencurian. (P.A.F Lamintang 1989)

Tidak semua masalah perkara Pencurian Pelaku Dewasa mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan bersama dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan restorative justice. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku dewasa ini yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. (Rahmawati 2019)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Jadi penelitian yang dilakukan berfokus pada peraturan perundang-undangan selanjutnya pada Penelitian Hukum Normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itu landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran Teori Hukum Normatif yang dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan. konsep tentang Restorative Justice.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dimana pembahasan terhadap objek penelitian dikaji dalam sebuah tatanan lingkup normatif. Mengutip pendapat seorang sarjana bernama Jonny Ibrahim bahwa prosedur dalam penelitian ilmiah dalam mencari sebuah keabsahan atas didasari sebuah logika

ilmu hukum dipandang di sisi segi normatifnya. Dimuat metode yuridis normatif menunjukkan pada metode penelitian dengan menganalisis dan kemudian menghubungkan dengan aturan hukum. (Ibrahim J 2006)

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual terkait (Restorative Justice) dan pendekatan perundang undangan serta Case Study terkait Tindak Pidana Ringan, Maka pada prosesnya juga terdapat sebuah studi kepustakaan. Bahan hukum yang berperan dalam menyusun jurnal ilmiah ini berupa peraturan perundang undangan dan buku buku hukum.

Bahan hukum yang penulis gunakan ialah hukum primer dari perundang-undangan dan hukum sekunder dimana sebagai bahan yang memuat pengertian tentang bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik library research dan akan dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat analisis secara normatif. Bahan hukum dikumpulkan dengan menelusuri sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian ditelaah poin-poin penting yang terkait. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan dan diseleksi kemudian disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu kasus konkret. (Suardita and Mh 2017)

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (content analysis) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan. Teknik Analisis ini merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan, Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. (Ariawan 2013)

Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

1.1 Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa AGUS TJATUR WIDODO BIN MUSTAJI Pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Masjid ULUL AZMI Jl Mulyorejo Kampus C UNAIR Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Terdakwa AGUS TJATUR WIDODO BIN MUSTAJI singgah di Masjid ULUL AZMI Kampus C UNAIR untuk melaksanakan Sholat Ashar, kemudian setelah sholat Ashar selesai Terdakwa keluar masjid dan melihat Sepasang sepatu merek Diadora Warna biru milik Saksi HAFID MUHADI di Rak Sepatu Masjid, selanjutnya Terdakwa AGUS TJATUR WIDODO BIN MUSTAJI memperhatikan keadaan sekitar dan setelah melihat tidak ada orang Terdakwa langsung mengambil sepatu merek Diadora Warna biru milik Saksi HAFID MUHADI yang ada di Rak Sepatu dan memasukkan ke dalam Tas Ransel milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memasukkan sepatu merek Diadora Warna biru milik Saksi HAFID MUHADI yang ada di Rak Sepatu kemudian pergi meninggalkan Masjid;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan sepatu merek Diadora Warna biru milik Saksi HAFID MUHADI yang ada di Rak Sepatu ke dalam Tas Ransel milik Terdakwa diSaksikan oleh Saksi CAKRA WARITSU dari Parkiran Mobil dan Saksi CAKRA WARITSU melaporkan perbuatan terdakwa ke Saksi DEDDY DWI KRISNAWAN dan Saksi HENDRO SUPARNO selaku Satpam pada Kampus C UNAIR dan setelah itu dilakukan Pemeriksaan kepada Terdakwa AGUS TJATUR WIDODO BIN MUSTAJI dan ditemukan Sepasang Sepatu sepatu merek Diadora Warna biru milik Saksi HAFID MUHADI di dalam tas Terdakwa AGUS TJATUR WIDODO BIN MUSTAJI

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa diatas Saksi HAFID MUHADI mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

1.2 Putusan Hakim

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Tjatur Widodo Bin Mustaji Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Tjatur Widodo Bin Mustaji Alm dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- Sepatu merek Diadora Warna Biru dikembalikan kepada Pemiliknya HAFID MUHADI dan Tas Ransel Warna Hitam di Rampas Untuk di Musnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

2. Pembahasan

2.1 Kesesuaian Dakwaan pada Putusan Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby dengan perbuatan terdakwa

Pada Tahapan Penuntutan saat Jaksa mengeluarkan Surat Dakwaan, Jaksa harus tetap cermat terkait dakwaan pada pelaku Tindak Pidana, karena dalam kasus ini dapat dikenakan Pasal 364 KUHP jika mengimplementasikan Perma No 2 Tahun 2012.

Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun karena untuk mencapai suatu tujuan dalam menegakkan hukum dan dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan di tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum, jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan.

Oleh karena itu, sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana pada Dakwaan tersebut dapat penulis lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sedangkan Unsur-Unsur pada Pasal 364 KUHP

1. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5.
2. Asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

3. Maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan.

Maka perbedaan pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 364 KUHP, terletak pada kerugian yang dialami korban jika dibawah Rp. 250 maka masuk dalam Pasal 364 KUHP, dan Pencurian Sepatu ini dilakukan di tempat umum yang mana bukan rumah maupun pekarangan yang ada rumahnya.

Terkait dengan kasus pencurian sepatu yang dilakukan oleh saudara AT, Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk memenjarakan saudara AT selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa AT sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Pasang sepatu Diadora warna hijau.

Bahwa dapat dilihat Jaksa Penuntut Umum Tidak mengimplementasikan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan, sudah dijelaskan pada Perma No 2 Tahun 2012 jika Pencurian dibawah 2,5 Juta dapat masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yaitu Pasal 364.

Adanya Perma ini juga menimbulkan kontra dari berbagai pihak khususnya praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini kasus pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, tidak bisa ditahan dan kasus pencurian tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari saja.

Perma ini bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik. Salah satu penafsiran itu diantaranya memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan tipiring.

Perma ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar menawar penegak hukum di tingkat bawah khususnya, dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. Kekhawatiran dari Perma ini nantinya semakin memarakan permainan jual beli hukum. Perma ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus tipiring tersebut.

Pertimbangan Perma ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP, melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Namun dilihat dari butiran

Pasal-Pasal dalam Perma ini secara tidak langsung merubah ketentuan dalam KUHP dan seakan menjadi *lex specialis* dari KUHP yang mengatur tentang hukum pidana materil bukan ranah hukum pidana formil, karena ketentuan materilnya dirubah maka secara otomatis penegakan hukum formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Pengaturan mengenai kewenangan pengaturan MA yang sebelumnya bersumber dari Pasal 131 UU No. 1 Tahun 1950, sebagai langkah untuk mengisi kekosongan dalam fase peralihan. Pada prakteknya, pengaturan yang dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini tidak hanya terbatas pada usaha mengisi kekosongan ketika itu, apalagi hanya terkait hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung itu tadi. Produk hukum ini bahkan masih tetap digunakan hingga saat ini.

Pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian.

Dakwaan pada putusan Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pertama, terkait dakwaan pada putusan ini dikenakan pasal 362 KUHP sementara perbuatan terdakwa sesuai pada pasal 364 KUHP dilihat dari Unsur Pencurian yang dilakukan Tidak didalam rumah dan bukan rumah yang ada pekarangannya. Kedua, pada putusan ini pelaku melakukan pencurian sepatu yang kerugiannya dibawah 2,5 Juta, dilakukan pada siang hari, ditempat umum, dan tidak menimbulkan luka maka hal tersebut sesuai dengan konsep Tindak Pidana Ringan yang ada dalam pasal 364 KUHP.

2.2 *Perkara Pencurian dalam Putusan Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby dan proses melalui pendekatan Restorative Justice*

Kasus yang dilakukan oleh saudara AT dituntut untuk bertanggung jawab dengan bermusyawarah kemudian mengembalikan sepatu yang dicurinya maka

korban dapat dipulihkan kerugiannya akibat pidana. Sehingga dengan penyelesaian berdasarkan perdamaian dan secara kekeluargaan tersebut, hubungan sosial di tengah masyarakat dapat dipulihkan, dan perkara pidananya dapat dihentikan, yang pada akhirnya dapat meringankan beban penyelesaian perkara oleh penegak hukum.

Beberapa tahapan atau proses peradilan pidana di Indonesia harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Dalam penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan di Kepolisian Republik Indonesia jika dilihat dari sudut hukum, pekerjaan kepolisian antara lain berupa penerapan atau penegakkan hukum dengan kata lain polisi menjadi status quo dari hukum.

Kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif.

Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

Jadi, sudah banyak Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan di berbagai tingkatan atau proses peradilan dan harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

Maka saudara AT harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Karena Undang-Undang telah menentukan balasan untuk perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman hukum dalam bentuk pidana tertentu. Konsep pertanggungjawaban pidana selain menghubungkan pidana dengan hukum acara pidana. Dimensi faktual bertujuan meneliti terpenuhinya kesalahan si pembuat tindak pidana. Dalam pengertian normatif, kesalahan bermakna dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana.

Melihat konsep pertanggungjawaban pidana di atas, kasus saudara AT yang melakukan pencurian sepatu.

perbuatannya dicela oleh masyarakat setempat sehingga dapat dikatakan bahwa saudara AT telah melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena perUndang-Undangan menuntut kepada terdakwa atau tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, yang dalam istilah hukum disebut “pertanggungjawaban pidana”.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dibebani pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh perUndang Undangan sebagai suatu tindakan pidana.

Berkenaan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak, hal ini dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan dalam persidangan yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. di dalam KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang di pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua pemeriksaan singkat, dan ketiga pemeriksaan cepat, dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Pemeriksaan sidang perkara biasa hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja yang diberikan batasan. Pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penuntut Umum yang menentukan pemeriksaan dalam persidangan, apakah pemeriksaan suatu perkara itu sederhana atau singkat.

Penulis melihat dan menganalisa putusan Nomor 2605/Pid.B/2020/PNSby, bahwa putusan tersebut tidak mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda.

saudara AT disidangkan dengan pemeriksaan biasa. Jika melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh saudara AT, seharusnya saudara AT disidangkan dengan pemeriksaan cepat dan tidak dikenakan penahanan. Dalam putusan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara AT dikenakan pasal 362. Namun apabila dilihat dari sudut pandang PERMA No. 2 Tahun 2012, seharusnya tindak pidana yang dilakukan saudara AT dikenakan pasal 364 yaitu tindak pidana ringan.

PERMA No. 2 Tahun 2012 sangatlah relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun dalam

putusan ini hakim memiliki alasan dan pertimbangan mengapa PERMA No.2 tahun 2012 tidak diterapkan. Selanjutnya menurut pendapat salah satu hakim sebab-sebab tidak diterapkannya PERMA No 2 Tahun 2012 dalam kasus tindak pidana ringan yaitu:

a. Kedudukan PERMA No 2 tahun 2012 yang masih dibawah KUHP maka dari itu jaksa penuntut umum masih memakai tindak pidana biasa, yakni tersangka dikenakan pasal 362 tentang pencurian biasa dan yang kedua bahwa dalam tindak pencurian sepatu, pihak kepolisian tuntutananya memakai tindak pidana biasa. Walaupun PERMA No 2 Tahun 2012 sudah diedarkan di nusantara dari pihak hakim tidak bisa menyuruh untuk menggunakan PERMA tersebut.

b. Dari pihak penegak hukum yang tidak memakai PERMA No 2 Tahun 2012, seperti halnya dari pihak polisi tidak memakai PERMA, dari penuntut umum, dan pihak hakim. Maka dari ketiganya harus saling berkoordinasi Antara pihak kepolisian jaksa dan hakim.

c. Hukum dikhawatirkan akan menjadi alat permainan oleh penjahat karena batasan nominal yang disebutkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 yang dirasa cukup besar dan meresahkan masyarakat.

Menurut penulis dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh saudara AT yang dijatuhkan dengan pasal 362 KUHP seharusnya tidak dilakukan penahanan. Pasal 207 ayat (1) b menjelaskan bahwa dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh hakim harus disidangkan pada hari sidang itu juga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara seharusnya tidak memakai penahanan. jadi ketika penyidik memberitahukan secara tertulis hari dan tanggalnya maka terdakwa harus hadir pada waktu itu untuk mengikuti persidangan.

Salah satu jaminan konstitusional dalam hukum yang dimaksud ialah hak atas bantuan hukum. Dalam konteks hak bantuan hukum KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum di setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 jo pasal 56 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Penyidik atau pejabat yang memeriksa seharusnya memberitahukan hak saudara AT dan menunjuk penasehat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa. Namun KUHAP tidak mengatur apa akibat hukum jika hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi. Akibat hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa putusan Putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi. Sehingga ketentuan diatas belum cukup memberikan perlindungan yang utuh (kepastian hukum) bagi saudara AT.

Dalam putusan ini, saudara AT juga tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaannya. Seharusnya dalam konteks peradilan pidana, hak atas bantuan hukum atau hak tersangka/terdakwa didampingi penasehat hukum adalah wajib, berdasarkan pasal 114 KUHAP dan pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak - hak tersangka atau terdakwa dan menyediakan penasehat hukum jika tersangka atau terdakwa tidak mampu. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam hal melakukan penyidikan, apakah perkara ini dapat diselesaikan pada tahap pertama dalam sistem peradilan yaitu penyidikan, ataukah patut dilanjutkan dan diperiksa pada tahap penuntutan. Sesuai dengan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun kewenangan ini sering kali takut digunakan oleh pihak kepolisian karena kurangnya pengetahuan dan ketakutannya akan hukum positif, dan menjadi ketakutan oleh kepolisian akan penilaian masyarakat awam yang beranggapan bahwa kewenangan kepolisian ini adalah acara ilegal yang merupakan “akal-akalan” dari pihak kepolisian guna mengambil untung dari pihak-pihak yang berperkara.

Padahal dalam praktik pemeriksaan kasus pidana, ide awal munculnya kewenangan lebih banyak berasal dari pihak berperkara, khususnya pihak korban. Sehingga dasar daripada penerapan keadilan restoratif pada kepolisian berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Selain Perma No.2 Tahun 2012 sebenarnya penegak hukum sudah membentuk forum koordinasi dan konsultasi antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum,

dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Polri, Forum itu dinamai Mahkumjakpol.

Dalam forum ini disepakati penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012. Menurut menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Mahkumjakpol penting karena penegakkan hukum di Indonesia masih bergelut dengan permasalahan internal berupa koordinasi dan konsultasi antar lembaga.

Hal Ini yang perlu dibenahi agar sistem hukum mampu menjawab tantangan utama penegakkan hukum dan keadilan.

Tujuan penegakan hukum ada tiga antara lain untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, Mahkumjakpol dinilai penting mengingat munculnya sejumlah kasus tindak pidana ringan belakangan ini, seperti kasus pencurian helm yang dilakukan oleh saudara AT, ini betul secara yuridis namun tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan rasa keadilan masyarakat tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

Sehingga Kejaksaan Agung termasuk dalam Nota Kesepakatan Bersama Mahkumjakpol tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan pada kenyataannya dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh saudara AT, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dakwaan dan tuntutan melanjutkan hasil penyidikan Kepolisian sehingga mengabaikan Nota Kesepakatan serta membuat dalil unsur dari Pasal 362 KUHAP yang menjadi dakwaan bukan unsur Pasal 364 KUHAP.

Pada perkara pencurian dalam Putusan Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby tidak dapat diproses dengan pendekatan restorative justice. argumentasi Pertama, berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 mulai dari tahapan Di tingkat Penyidikan (Kepolisian), lalu di tingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan tingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, bahwa tidak dapat diproses dengan Restorative Justice mengenai proses terkait semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kedua, Jika Putusan ini dikenakan pasal 364 KUHP maka dapat dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai pasal 205 ayat 1 KUHAP.

PENUTUP

Simpulan

Dakwaan pada putusan Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pertama, terkait dakwaan pada putusan ini dikenakan pasal 362 KUHP sementara perbuatan terdakwa sesuai pada pasal 364 KUHP dilihat dari Unsur Pencurian yang dilakukan Tidak didalam rumah dan bukan rumah yang ada pekarangannya. Kedua, pada putusan ini pelaku melakukan pencurian sepatu yang kerugiannya dibawah 2,5 Juta, dilakukan pada siang hari, ditempat umum, dan tidak menimbulkan luka maka hal tersebut sesuai dengan konsep Tindak Pidana Ringan yang ada dalam pasal 364 KUHP.

Pada perkara pencurian dalam Putusan Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby tidak dapat diproses dengan pendekatan restorative justice. argumentasi Pertama, berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 mulai dari tahapan Di tingkat Penyidikan (Kepolisian), lalu di tingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan tingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, bahwa tidak dapat diproses dengan Restorative Justice mengenai proses terkait semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kedua, Jika Putusan ini dikenakan pasal 364 KUHP maka dapat dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai pasal 205 ayat 1 KUHAP.

Saran

Sanksi hukum yang diberikan pada pelaku pencurian harus dilakukan dengan hati hati dan cermat dengan melihat tujuan adanya sebuah hukum yang syarat dengan nilai keadilan, penyelesaian kasus pencurian dengan nilai yang tidak begitu besar seharusnya diselesaikan secara musyawarah. KUHP seharusnya menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

Jaksa Penuntut Umum seharusnya melaksanakan upaya Restorative Justice, yakni upaya mencapai kesepakatan damai antara pelaku atau keluarganya dengan korban untuk menetapkan ganti rugi yang sesuai, sehingga diperoleh kesepakatan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.

Ariawan, I. gusti Ketut. 2013. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF." *Kertha Widya* 1(1):26–27.

Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. edited by B. Burhan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dr. Diah Ratna Sari Hariyanto, S. H. ,. M. H. 2018. "PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PUTUSAN HAKIM." Universitas Udayana 9–11.

Haryono. 2008. "Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa." Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 357.

Hattu, Jacob. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus." *Jurnal Belo* 6(1):11–31. page 11-31.

Howard Zehr. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti. 2013. "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Kertha Semaya* 01(03):4.

Ibrahim J. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Mulyani, Sri. 2016. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16(3):10–11.

Muhaimin. 2019. "RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 185–189.

P.A.F Lamintang. 1989. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.

Philipus M. Hadjon. (1994). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Philipus M Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Putra, Marsudi Dedy. 2019. "KONTRIBUSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA." *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* ISSN: 1410-8771 16(02):53–57.

- Prof. Moeljatno, S. H. n.d. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- R. Soesilo. 1988. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. edited by S. R. Bogor: Politea.
- Rahmawati, Ratu. 2019. "PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Dompu)." Universitas Muhammadiyah Mataram 4-5.
- Setiono. 2004. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 3.
- Sosiawan, Ulang Mangun. 2016. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM." De Jure 430.
- Suardita, I. Ketut, and S. H. Mh. 2017. PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI MAHASISWA SEMESTER I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA.
- Supriyadi. 2015. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus." Mimbar Hukum UGM 27(3):10.
- Wirdjono Wodjodikoro. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Muladi. 2005. HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. edited by Muladi. Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, Bambang. 1983. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Perma no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
- SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
- Perja no 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative
- PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF